



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PANTAI TELUK PENYU KABUPATEN CILACAP

Tri Oktavia Ulya, Augustin Rina Herawati, Ari Subowo

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id
trioktaviaulya22@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on the collaboration process in waste management at Teluk Penyus Beach. Waste problems often occur in one of the tourist icons in Cilacap Regency, so collaboration from multiple stakeholders is needed to manage the problem. The purpose of this research is to describe and analyse collaborative governance in waste management at Teluk Penyus Beach, as well as identify and analyse the factors that influence collaborative governance in waste management at Teluk Penyus Beach. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The theory used in this research is Ansell and Gash's theory which consists of starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration process (face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes). The results of this study show that (1) collaborative governance in waste management at Teluk Penyus Beach has implemented the five dimensions of the collaboration process quite well. (2) Factors that influence the collaboration process in waste management at Teluk Penyus Beach include starting conditions, institutional design, and facilitative leadership, but the institutional design dimension is still not optimal because there is no legal basis that specifically regulates the collaboration process in waste management at Teluk Penyus Beach, Cilacap Regency.

Keywords: *Collaborative Governance, Waste Management, Teluk Penyus Beach*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pantai Teluk Penyus merupakan salah satu pantai di Kabupaten Cilacap yang memiliki ciri khas dan potensi yang unik dari pantai lainnya. Di antara objek wisata pantai yang terkenal, Pantai Teluk Penyus menjadi icon wisata di Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, objek wisata Pantai Teluk Penyus dipegang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Cilacap. Pada saat itu, Pantai

Teluk Penyus menjadi penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Cilacap. Namun, sejak Pantai Teluk Penyus dan dua objek wisata unggulan lainnya yakni Pantai Widara Payung dan Benteng Pendem dipegang oleh TNI, PAD Kabupaten Cilacap mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan, setelah Pantai Teluk Penyus dikelola oleh TNI AD masuk sepenuhnya ke koperasi kodam. Pada awal tahun 2019, objek wisata Pantai Teluk Penyus yang

sebelumnya dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap, dialihkan pengelolaannya kepada Kodam selaku pemilik tanah. Hal ini membuat, pembangunan dan penataan kawasan Pantai Teluk Penyu menjadi di bawah kendali TNI AD.

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh (Eka, 2018) dinyatakan bahwa hambatan dalam penataan lokasi obyek wisata Pantai Teluk Penyu yaitu dana anggaran yang tidak mencukupi, masyarakat, kepemilikan tanah TNI, dan adanya jalur pipa pertamina. Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan tanah oleh TNI telah menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan objek wisata Pantai Teluk Penyu. Dinas Pariwisata selaku penganggung jawab pengelola obyek wisata Pantai Teluk Penyu pada saat itu, terus melakukan upaya untuk menghadapi hambatan tersebut, salah satunya yaitu menjalin kerja sama setiap tahun dengan TNI AD sebagai pemilik lahan. Hal ini menjadi hal menarik mengenai bagaimana TNI AD sebagai pemegang kendali Pantai Teluk Penyu sejak 2019 melakukan kerja sama dengan pihak lainnya dalam mengelola Pantai Teluk Penyu sebagai icon wisata Kabupaten Cilacap, karena sebelumnya kepemilikan tanah oleh TNI AD menjadi salah satu hambatan Dinas Pariwisata dalam menata lokasi objek wisata Pantai Teluk Penyu.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dijelaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam peningkatan potensi pariwisata yaitu, memfasilitasi, mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata. Adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan peningkatan potensi Pantai Teluk Penyu sebagai icon wisata sangatlah penting. Namun, ditemukan bahwa pengelolaan Pantai Teluk Penyu saat ini tidak dipegang lagi oleh Pemda Cilacap tetapi dikelola oleh TNI AD. Hal ini menjadikan persoalan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh TNI AD sebagai pemilik tanah dan pengelola Pantai Teluk Penyu dengan Pemda Cilacap yang memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi pariwisata.

Di sisi lain ditemukan pula, permasalahan yang ada di Pantai Teluk Penyu yakni adanya masalah sampah yang berserakan di sekitar pantai. Pengelolaan sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan

sampah. Pengelolaan sampah merupakan hal krusial untuk dilakukan sebab bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Keidentikan daerah pesisir pantai dengan daerah pariwisata membutuhkan peran dan partisipasi para stakeholder supaya dapat membangun objek wisata serta bisa menjaga lingkungan secara berkelanjutan (Minget al., 2020 dalam (Nusantara et al., 2022)). Untuk itu, pengelolaan sampah yang baik dapat dilakukan melalui kolaborasi antar stakeholder agar bisa meningkatkan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 terkait Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Cilacap yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab kolektif antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Regulasi ini diterbitkan agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara baik melalui koordinasi dan kerja sama dari banyak pihak. Peraturan ini diberlakukan untuk semua kawasan, di mana salah satunya adalah Pantai Teluk Penyu yang menjadi *icon* wisata Kabupaten Cilacap.

Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa permasalahan sampah di objek wisata Pantai Teluk Penyu masih kerap

terjadi, penampakan sampah di beberapa area masih terlihat. Berdasarkan survei dan monitoring kawasan perairan Teluk Penyu Cilacap yang dilakukan oleh Pusat Studi Biosains Maritim (PSBM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) serta pihak lainnya sejak tahun 2015 menyatakan bahwa pencemaran makroplastik di wisata Pantai Teluk Penyu Cilacap berkisar antara 16.8–41.6 item/m², hampir sama dengan jumlah yang ditemukan di wisata pantai di sekitar Laut China Selatan dan Pasifik Selatan (Chili) (serayunews.com, 2021). Hal tersebut menunjukkan tingginya pencemaran sampah di Pantai Teluk Penyu.

Masalah kedua yang ditemukan di lapangan yakni ketersediaan tempat sampah di sekitar Pantai Teluk Penyu masih belum optimal. Berdasarkan observasi pra penelitian oleh peneliti, ditemukan adanya tempat sampah yang tersedia di setiap warung di sekitar tepi pantai yang sulit dijangkau pengunjung. Tempat sampah tersebut diberikan oleh pihak swasta yakni Aqua kepada para pedagang yang memiliki warung di tepi Pantai Teluk Penyu.

Munculnya masalah sampah di pantai merupakan akibat buruknya tata kelola khususnya pemerintahan dalam hal pelestarian sektor kelautan yang penting. Dalam fenomena plastik sampah di Pantai Teluk Penyu, kerja sama pemerintah

dengan pihak swasta dan masyarakat dapat menjadi hal penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. McGuire dalam (Ain et al., 2021) menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah upaya pengelolaan pemerintah yang memfasilitasi pemecahan masalah secara kolaboratif dengan melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah dalam implementasinya. Penanganan masalah sampah di Pantai Teluk Penyu bukan sekadar merupakan tanggungjawab satu pihak, tetapi juga melibatkan stakeholder yang lain yakni masyarakat, pemerintah dan swasta. Tata kelola kolaboratif yang melibatkan para stakeholder akan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Pantai Teluk Penyu (Ain et al., 2021).

Berdasarkan beberapa literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat relasi yang positif antara *collaborative governance* dengan pengelolaan sampah sehingga sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk meneliti bagaimana **“Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan arah yang jelas dan bermanfaat. Tujuan penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Situs penelitiannya adalah Pantai Teluk Penyu, yang terletak di Kabupaten

Cilacap. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Ketua Pengelola Pantai Teluk Penyu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Cilacap, para pedagang di sekitar Pantai Teluk Penyu, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, dan PT. SBI Cilacap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap

Pada model *collaborative governance* yang dirumuskan oleh Ansell & Gash (2008) terdapat lima proses kolaborasi, yakni dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Berikut ini adalah proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap:

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka di antara para pemangku kepentingan merupakan landasan dari *collaborative governance* untuk mencapai

konsensus dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu. Untuk menemukan peluang kerja sama yang menguntungkan, dialog tatap muka sangatlah penting. Salah satu bentuk dialog tatap muka yang sudah dijalankan dalam pengelolaan sampah di pantai yakni melalui forum pertemuan yang dihadiri oleh beberapa stakeholders. TNI AD sebagai pihak pengelola pantai telah mengadakan dialog tatap muka berupa pertemuan dan koordinasi dengan pihak lain baik dari aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Forum pertemuan ini dilakukan pada awal tahun untuk membahas perencanaan koordinasi kegiatan bersih sampah di Pantai Teluk Penyu. Pada proses *collaborative governance* pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu, beberapa stakeholders memiliki perannya masing-masing. Dalam hal ini, peran stakeholders terbagi menjadi dua yaitu stakeholders utama dan stakeholders sekunder. Hanya terdapat tiga stakeholders kunci atau pihak utama yang terlibat secara rutin dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu, yaitu TNI Angkatan Darat, Dinas Lingkungan Hidup, dan para pedagang di sekitar Pantai Teluk Penyu. Sedangkan

stakeholders lainnya menjadi stakeholders sekunder diantaranya ada Bappeda, Kelurahan, Kecamatan, masyarakat, dan swasta seperti Pertamina, SBI, S2P, akademisi, komunitas. Setiap stakeholders utama memiliki peran dan tugas masing-masing. TNI AD selain sebagai pihak pengelola pantai juga berperan sebagai koordinator dan fasilitator, DLH sebagai mitra yang membantu TNI AD dalam melaksanakan program pengelolaan sampah, dan para pedagang memiliki peran pendukung yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam kegiatan bersih sampah. Meskipun demikian, semua aktor memiliki tujuan dan kepentingan bersama yaitu mengelola sampah yang ada dan menjaga kebersihan di lingkungan Pantai Teluk Penyu. Atas dasar kepentingan yang sama ini terjadilah proses kolaborasi. Keterlibatan stakeholders yang lain tidak berlangsung secara rutin setiap hari. Mereka hanya terlibat kegiatan kolaborasi ketika terdapat suatu pihak atau instansi yang mengadakan kegiatan bersih pantai dan kemudian pihak lainnya berperan serta dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

dialog tatap muka yang terjadi dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah sejalan atas apa yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) bahwa dialog langsung dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama.

2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan adalah satu hal yang dibutuhkan dalam menghadapi keterbatasan kapasitas dan perbedaan kepentingan antar para stakeholders pada proses kolaborasi. Kepercayaan harus dibangun di antara para stakeholders agar proses kolaborasinya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, TNI AD dalam kapasitasnya sebagai pengelola pantai, memiliki tanggung jawab untuk membina kerjasama dan membangun kepercayaan di antara para stakeholders yang mungkin mempunyai kepentingan yang berbeda. Tahap membangun kepercayaan pada *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah dilakukan dengan baik. Para pemangku kepentingan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah membangun kepercayaan yang ada.

Salah satu bentuk membangun kepercayaan yang dijalankan yaitu melalui penyelenggaraan kegiatan informal yang melibatkan beberapa pihak untuk mengelola sampah di pantai. Adanya kesadaran dan kepentingan untuk menjaga lingkungan di sekitar pantai memunculkan rasa percaya terhadap satu sama lain untuk dapat menjalankan peran dan tugasnya dalam proses kolaborasi. Hal tersebut sesuai atas apa yang disampaikan oleh Ansell dan Gash (2008) dalam penelitiannya bahwa proses kolaborasi melampaui sekadar berkomunikasi; melibatkan juga dalam pembentukan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Membangun kepercayaan oleh para pemangku kepentingan ini didukung dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan. Proses komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan ini mampu menambah tingkat kepercayaan mereka.

3. Komitmen Terhadap Proses

Dalam proses kolaborasi, komitmen sangatlah penting. Diperlukan komitmen yang perlu diterapkan dalam mencapai pemenuhan hasil musyawarah walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai

masalah yang ada demi terwujudnya kolaborasi yang baik di antara para pemangku kepentingan (Islamy, 2018 dalam (Chotimah et al., 2021)). Komitmen terhadap proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah dilakukan dengan cukup baik. Meskipun belum ada proses aturan formal yang mengatur, namun kendala tersebut tidak berpengaruh pada komitmen terhadap proses ini. Hal tersebut dikarenakan setiap aktor yang terlibat memahami betapa pentingnya memenuhi peran dan tanggung jawab sehingga komitmen yang tinggi dapat tercipta pada proses kolaborasi. Pemahaman dan kesadaran bahwa masing-masing aktor memiliki tugas yang berbeda satu sama lain memunculkan adanya ketergantungan di antara satu pihak dengan pihak lainnya. Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang berkelanjutan dari masing-masing pihak untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Sejalan atas hal yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) bahwa komitmen tentu saja terkait dengan motivasi awal dalam berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif, dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu ini para pemangku

kepentingan telah memiliki motivasi untuk berkomitmen dalam proses kolaborasi yakni terkait dengan tanggung jawab dari tiap-tiap pihak. Hal tersebut dikarenakan semua pihak mempunyai tugas dan peranan secara individu yang saling berkaitan. TNI Angkatan Darat, Dinas Lingkungan Hidup, dan para pedagang berkomitmen dalam proses kolaborasi atas dasar tujuan yang sama.

4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama merupakan komponen penting dari setiap kerja sama yang dibentuk dan disepakati, dan hal ini harus melekat pada setiap pihak yang terlibat. Kesamaan kepentingan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai kesamaan dalam isu masalah yang dihadapi, visi dan misi, sasaran yang ingin dicapai, serta arah dan rencana strategis yang jelas (Chotimah et al., 2021). Pemahaman bersama di sini menggambarkan masalah, tujuan, dan nilai-nilai yang hendak diperoleh dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu. Permasalahan sampah di pantai merupakan isu yang penting karena sampah yang ada tidak mudah untuk dibersihkan dalam sekali saja. Sampah-sampah tersebut tidak hanya diciptakan oleh

para pengunjung pantai, tetapi juga dihasilkan dari sampah-sampah aliran sungai yang kemudian mengalir ke pantai sehingga menyebabkan sampah tersebut mengotori air laut dan berserakan di permukaan pantai. Sehingga, dibutuhkan peran dari banyak pihak agar masalah sampah ini dapat lebih mudah diatasi. Pemahaman bersama dalam proses *collaborative governance* pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah dilakukan dengan baik. Ansell dan Gash (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pada titik ini para pemangku kepentingan harus memupuk pemahaman kolektif mengenai tujuan bersama mereka. Hal tersebut telah diterapkan pada *collaborative governance* pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu di mana para pemangku kepentingan memahami nilai-nilai bersama demi mencapai tujuan yang hendak dicapai bersama yakni untuk mewujudkan Pantai Teluk Penyu yang bersih dan nyaman.

5. Hasil Sementara

Salah satu jenis output atau keluaran kebijakan adalah hasil dari proses kolaborasi kebijakan. Hasil sementara merupakan capaian yang dihasilkan dari proses kolaborasi

yang mampu mendukung keberhasilan proses tersebut. Keberlanjutan kolaborasi akan dipengaruhi oleh hasil sementara, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Hasil sementara dari proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu sudah cukup baik. Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa hasil sementara dari proses kolaborasi adalah sebuah *output* yang nyata. Hasil sementara *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah diwujudkan secara nyata yaitu berupa peraihan Adipura Kabupaten Cilacap, di mana salah satu indikator di dalamnya adalah Pantai Teluk Penyu. Meskipun demikian, permasalahan sampah yang ada di pantai masih perlu membutuhkan solusi yang tepat agar masalah dapat sepenuhnya teratasi.

B. Faktor-faktor Pendukung Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu

Faktor-faktor pendukung proses *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008) ada tiga, yakni kondisi awal (*starting conditions*),

desain kelembagaan (*institutional design*), dan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*).

1. Kondisi Awal

Kondisi awal memiliki pengaruh pada sebelum terjadinya kolaborasi yang menjadi pendukung maupun penghambat kinerja para stakeholders. Hal tersebut terlihat melalui kerja sama yang pernah dilakukan dan bentuk partisipasi serta koordinasi dalam proses kolaborasi. Kondisi awal merupakan tahapan awal yang menjadi penyebab munculnya kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu. Pantai Teluk Penyu merupakan icon objek wisata di Kabupaten Cilacap yang dikelola oleh TNI AD sebagai pemilih tanah. Pada observasi yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa pencemaran sampah masih kerap terjadi di sekitar objek wisata ini. adanya kesadaran dari berbagai pihak dalam rangka untuk menjaga kebersihan Pantai Teluk Penyu, maka terjadilah kolaborasi dari pihak-pihak tersebut dalam kegiatan bersih pantai. TNI AD sebagai pengelola pantai memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Pantai Teluk Penyu termasuk masalah sampah. Untuk itu, pihak TNI AD

telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga kebersihan pantai. Ansell dan Gash (2008) mengemukakan bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi ataupun menghambat kerja sama antar pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi awal proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu telah mendorong adanya kerja sama para stakeholders untuk mengelola permasalahan sampah ini. Kerja sama yang muncul disebabkan karena munculnya kesadaran dari masing-masing pemangku kepentingan untuk peduli dalam menjaga dan mengelola sampah yang ada di pantai.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan memiliki peran penting dalam *collaborative governance* karena berkaitan erat dengan aturan dasar dan transparansi. Ansell dan Gash (2008) mengemukakan desain kelembagaan mengacu pada aturan-aturan dasar untuk kolaborasi yang telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan. Sesuai hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi tersebut, dapat ditarik simpulan bahwasanya belum

terdapat landasan hukum yang menetapkan secara khusus terkait proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu. Meskipun demikian, kolaborasi yang ada dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal tersebut sejalan atas yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008) bahwa tata kelola kolaborasi menekankan pada prosesnya yang harus inklusif dan terbuka.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung proses kolaborasi, dapat dilihat melalui kepemimpinan yang dijalankan di dalamnya. Fungsi kepemimpinan sangat penting dalam proses kolaborasi. Pemimpin mempunyai tugas dan pengaruh untuk menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta memotivasi keterlibatan mereka dalam proses kolaborasi. Proses kolaborasi memerlukan kepemimpinan yang kuat, dapat dipercaya, dan mampu menjadi mediator. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa TNI AD sebagai pengelola pantai berkedudukan sebagai koordinator dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu. Kepemimpinan yang dilakukan oleh

TNI AD dalam kolaborasi ini merupakan kepemimpinan yang koordinatif. Pemimpin memberi arahan langsung kepada stakeholders lainnya mengenai tugas dan perannya masing-masing.

Ansell dan Gash (2008) mengungkapkan bahwa peran kepemimpinan sangat vital dalam menciptakan dan menegakkan pedoman yang jelas, membangun kepercayaan, merangsang dialog, serta menemukan manfaat bersama. Pada penelitian di atas, secara keseluruhan kepemimpinan di dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu sudah berjalan dengan baik. TNI AD sebagai pemimpin jalannya kolaborasi telah menetapkan peraturan-peraturan nonformal yang berkaitan dengan peran masing-masing pemangku kepentingan, membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mengadakan forum pertemuan.

KESIMPULAN

A. Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap

Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap secara

keseluruhan telah berjalan dengan baik, hanya saja pada dimensi komitmen terhadap proses belum ada aturan formal terkait proses yang dijalankan. Namun, hal tersebut dapat tertutupi melalui adanya rasa saling ketergantungan dari para stakeholders.

B. Faktor-faktor Pendukung Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Peny Kabupaten Cilacap

Dua faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Peny Kabupaten Cilacap yaitu kondisi awal dan kepemimpinan fasilitatif telah berjalan dengan baik, sedangkan pada dimensi desain kelembagaan masih belum optimal karena belum ada landasan hukum yang mengatur secara khusus terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Peny Kabupaten Cilacap.

SARAN

Berdasarkan hasil dan analisis tersebut, peneliti mempunyai saran terhadap *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Peny Kabupaten Cilacap, yaitu:

1. Dalam desain kelembagaan dan komitmen terhadap proses, belum ada aturan/dasar hukum yang menjadi

landasan bagi pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu, sehingga peneliti merekomendasikan untuk perlu dibentuk landasan hukum tersebut agar proses kolaborasi dapat berjalan lebih maksimal sebab ada aturan yang jelas yang mendasari jalannya proses kolaborasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk aturan hukum berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) yang disepakati melalui kesepakatan bersama yang dilakukan oleh TNI AD dan Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan mengembangkan forum yang ada ke dalam bentuk yang lebih mengikat

2. Pelaksanaan dialog tatap muka pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu dilakukan setahun sekali pada awal tahun. Untuk menciptakan hasil yang lebih optimal, sebaiknya perlu dilakukan upaya meningkatkan intensitas dialog tatap muka. Langkah upaya tersebut dapat dilakukan melalui diadakannya forum pertemuan formal secara lebih sering yang melibatkan TNI AD, pemerintah, masyarakat, dan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, K. Q., Nasri, M. A., Alamsyah, M. N., Pratama, M. D. R., & Kurniawan, T. (2021). *Collaborative governance in managing plastic waste in Bali*. 905, 1–11. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012115>
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–24.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Azwar, A. (2002). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Rineka Cipta.
- Chotimah, H. C., Ridha Iswardhana, M., & Rizky, L. (2021). Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim Di Kepulauan Seribu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348–376. <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN>
- Dayana, M. (2021). *Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. 19(2), 106–116.
- Eka, N. (2018). Upaya Pengembangan Pantai Teluk Penyu Sebagai Obyek Wisata Unggulan Di Kabupaten Cilacap. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27. <https://eprints.uny.ac.id/52949/2/ejurnal13405244014.pdf>
- Enggara, R., Bahrum, Z., & Suherman, D. (2019). *Kajian Mekanisme Penyebaran Sampah di Kawasan Pantai Pariwisata Kota Bengkulu Sebagai Penyebab Degradasi*

- Nilai-Nilai Ekowisata*. 8(2), 39–48.
- Farah, M. A., & Makmur, M. H. (2022). *Pelaksanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. 9(4), 406–415.
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, Sunariyanto, Fauzan, R., Sagena, U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik* (A. Yanto (ed.)). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Imron, M. (2020). Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p68-74>
- Jayantri, A. S., Ridlo, M. A., Islam, U., & Agung, S. (2021). *Strategi pengelolaan sampah di kawasan pantai*. 1(2), 147–159.
- Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *Ijd-Demos*, 2(3), 225–239. <https://doi.org/10.37950/ijid.v2i3.57>
- Melaya, K., Jembrana, K., Bagus, M., & Bagus, I. (2019). *Pengelolaan Sampah Di Daya Tarik Wisata Pantai Candikusuma , Desa*. 7(2), 239–244.
- Nusantara, B. D., Yuwono, T., & Yuniningsih, T. (2022). *Collaborative Analysis of the Bengkulu City Regional Government in Overcoming Waste at the Tourism Object Analisis Kolaborasi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam mengatasi Sampah di Objek Pariwisata*. 10(3), 598–609.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Cilacap.
- Qalby, A. N. (2018). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kelurahan paropo kecamatan panakkukang kota makassar (bank sampah pusat)*. 1–81.
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). *Sampul Collaborative Governance*. 161.
- Rini, J. P., Sufianti, E., & Abdullah, S. (2021). *Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City*. 564(Icas 2020), 227–231.
- Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Ombak Tiga.
- Tampubolon, E. R., & Sri Rahayu, A. Y. (2019). Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat). *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.57>
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Wijaya, A. F., & Dinar, O. R. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.